



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 35 T
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 451-996-2019 tentang Penunjukan Kota Padang Panjang sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Nasional XXXIX Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Kegiatan Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Kegiatan Walikota/Wakil Walikota yang belum diakomodir dalam Renstra 2018-2013, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 T Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 T Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 35 T);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 35 T TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB VI pada Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 T Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 35 T), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Mei 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 22

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 22 Tahun 2020

Tanggal : 28 Mei 2020

Tentang : Perubahan Atas Peraturan
Walikota Padang Panjang
Nomor 35 T Tahun 2019
Tentang Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota
Padang Panjang Tahun 2018-
2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Padang Panjang memasuki babak baru dalam pelaksanaan pembangunan yakni periode lima tahunan ketiga RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 yang memiliki Visi “KOTA YANG MAJU, LESTARI, DAN ISLAMI”. Dengan telah berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2013-2018, melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah terpilih dan dilantik Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Fadly Amran dan Asrul untuk periode 2018-2023 pada tanggal 9 Oktober 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah harus menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Provinsi yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang akan berperan sebagai pendorong yang berperan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Untuk mengakomodir

hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang Panjang telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019. Pelaksanaan dari RPJMD tersebut dijabarkan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sekretariat Daerah Kota sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Padang Panjang tentunya harus berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan daerah yang akan dirumuskan menjadi Renstra SKPD yang akan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada Misi 2 dan Misi 3. sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang akan menjadi pedoman bagi perencanaan strategis dalam 5 tahun mendatang untuk periode 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 ;
 18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
 19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
 20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
 21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang

Panjang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah agar tersedianya suatu dokumen rencana strategis yang sistematis, terarah, terpadu, komprehensif yang memungkinkan adanya konsistensi perumusan perencanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Renstra ini antara lain adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Secara terinci tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk kurun 5 (lima) tahun kedepan;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 untuk

merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;

3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Dalam Bab ini dipaparkan Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2018-2023).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini dipaparkan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2018-2023).

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD untuk lima tahun kedepan (tahun 2018-2023).

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Perwako Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Staf Ahli.

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu

menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

2. Asisten.

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azazi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a.1 Bagian Pemerintahan ;

Bagian Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat;

Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

a.3 Bagian Hukum;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di Bagian Hukum.

Bagian Hukum terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Bantuan Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Dinas Pangan dan Pertanian;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas PU dan Penataan Ruang;
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- Dinas Komunikasi dan Informatika.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

b.1 Bagian Perekonomian;

Bagian Perekonomian dikepalai oleh Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas merencanakan

operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank Bagian Perekonomian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- 2) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

b.2 Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan;

Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengadaan barang jasa dan pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

- 2) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- 3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.

b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

c.1 Bagian Organisasi

mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,

mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Tata Lakasana;
- 3) Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.

c.2 Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum. Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan;
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga

c.3 Bagian Protokoler

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang Protokoler dan Dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri diri

- 1) Sub Bagian Protokoler; dan
- 2) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

2.2. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran

kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Menurut Golongan Tahun 2019

No	Uraian Unit Kerja	Golongan										Jml
		I		II		III		IV		Non PNS		
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
	Jenis kelamin											
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
3	Staf pada staf ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Asisten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Bagian Pemerintahan	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	7
6	Bagian Hukum	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	5
7	Bagian Organisasi	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	6
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	2	-	4	3	1	-	4	5	19
9	Bagian Perekonomian	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	6
10	Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan	-	-	5	1	8	3	1	-	-	-	18
11	Bagian Umum dan Perlengkapan	1	-	12	1	3	3	1	-	31	26	78
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	-	-	1	3	5	-	1	-	2	12
13	Bagian Protokoler	-	-	5	1	3	6	1	-	4	6	26
	Jumlah	1	0	28	5	29	27	10	3	39	39	181

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut golongan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik 2.1.

Jumlah Pegawai menurut Golongan



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019, diolah.

Selanjutnya bila dilihat latar belakang pendidikan pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

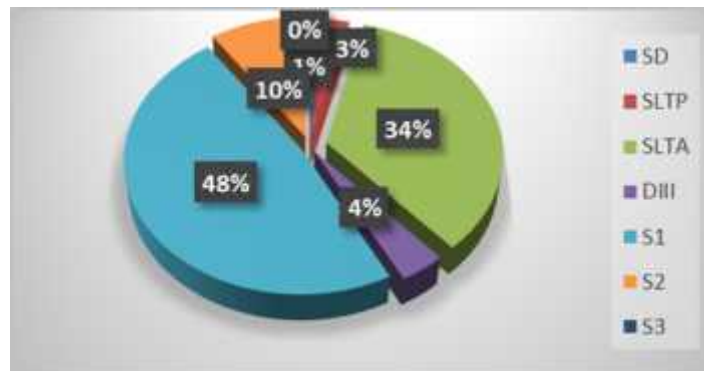
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Menurut Latar Belakang Pendidikan Umum
Tahun 2019

No	Uraian Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan							Jml
		SD	SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	S3	
1	Sekdako	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Staf ahli	-	-	-	-	1	2	-	3
4	Asisten	-	-	-	-	0	-	-	0
5	Bagian Pemerintahan	-	-	3	1	3	0	-	7
6	Bagian Hukum	-	-	2	-	3	1	-	6
7	Bagian Organisasi	-	-	1	-	4	1	-	6
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	4	-	6	-	-	10
9	Bagian Perekonomian	-	-	1	-	3	2	-	6
10	Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan	-	-	6	1	10	1	-	18
11	Bagian Umum dan Perlengkapan	1	3	11	0	4	2	-	21
12	Bagian Perencanaan dan Anggaran	-	-	2	2	6	-	-	10
13	Bagian Protokoler	-	-	6	0	10			16
	Jumlah	1	3	36	4	50	10	0	104

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang, 2018

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut latar belakang pendidikan umum tersebut dapat dilihat dari Grafik 2.2. di bawah ini :

Grafik 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2018, data diolah.

Adapun gambaran umum ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2019

No. Urut.	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Electric Generating Set	3	2	1	
2	Sedan	3	3		
3	Jeep	3	3		
4	Station Wagon	41	34	5	2
5	Bus penumpang	3	1	1	1
6	Truck + Attachment	1		1	

7	Sepeda Motor	55	45	4	6
8	Mesin Ketam	1	1		
9	Mesin Bor	1	1		
10	Mesin Ketik Elektronik	1	1		
11	Lemari Besi/Metal	12	10	1	1
12	Rak Besi/Metal	4	3	1	
13	Filling Besi/Metal	44	30	10	6
14	Band Kas	2	2		
15	Lemari Kaca	7	7		
16	Lemari Makan	2	2		
17	Box Arsip	1	1		
18	Alat Penghancur Kertas	3	3		
19	Papan Nama Instansi	1	1		
20	Papan Pengumuman	7	7		
21	Papan Tulis	1	1		
22	Mesin Absensi	3	3		
23	Meja Biro	25	20	5	
24	Kursi Biro	5	5		
25	Generator Set	3	3		
26	Meja Baca	1	1		
27	Stand Speaker	1	1		
28	Lemari Kayu	32	30	2	
29	Meja Kayu/Rotan	2	2		
30	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	3	3		
31	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	12	10	2	
32	Meja Rapat	31	31		
33	Meja Tulis	1	1		
34	Meja Makan	47	47		
35	Meja Panjang	5	5		
36	Kursi Rapat	8	8		
37	Kursi Tamu	17	17		
38	Kursi Putar	40	40		
39	Kursi Biasa	1	1		
40	Meja Komputer	12	12		
41	Kasur	9	9		
42	Tikar	60	60		
43	Meja 1/2 Biro	96	90	6	

44	Sofa	1	1		
45	Lemari Pakaian	5	4	1	
46	Lemari Rias	2	1	1	
47	Jam Elektronik	1	1		
48	Mesin Penghisap Debu	5	3	1	1
49	Mesin Cuci	5	3	1	1
50	Lemari Es	11	9	1	1
51	AC Sentral	1	1		
52	AC Unit	16	10	6	
53	Kipas Angin	10	10		
54	Alat Dapur	28	25	3	
55	Dispenser	8	7	1	
56	Alat Pemanas	10	9	1	
57	Televisi	22	20	2	
58	Amplifiler	2	2		
59	Wireless	6	6		
60	Microphone	5	4	1	
61	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1		
62	Camera Video	2	2		
63	Tangga Alumunium	2	2		
64	Kaca Hias	11	11		
65	Mimbar/Podium	2	2		
66	Handy Cam	4	4		
67	DVD (Disk Video Display)	1	1		
68	Gorden	3	3		
69	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	3	3		
70	Tangki Air	2	2		
71	Alat Pemadan/Portable	1	1		
72	Internet	3	3		
73	P.C. Unit	53	40	10	3
74	Laptop/Notebook	41	35	5	1
75	Hard Disk	6	6		
76	Power Suply	28	25		3
77	Peralatan Mini Komputer	1	1		
78	Printer/Printer scanner	39	39		
79	Scanner	11	11		
80	Server	3	3		

81	Router	1	1		
82	Hub	1	1		
83	Rak Server	1	1		
84	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	4		
85	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
86	Meja Tamu Ruangan Tunggu Menteri/Gub./Bup./Walikota	1	1		
87	Meja Tamu Biasa	13	13		
88	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	4		
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	3		
90	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
91	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	3	3		
92	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	3		
93	Camera Attachment	12	6		6
94	Loudspeaker	10	10		
95	Proyektor + Attachment	7	5		2
96	Microphone	26	6		20
97	Speaker Ramsa	1	1		
98	Equalizer	1	1		
99	Sound System	8	7		1
100	Headphone	1	1		
101	Microphone/Wireless Mic	2	2		
102	Battery Charger	1	1		
103	Power Amplifier	6	5	1	
104	Handycam	1	1		
105	Camera Digital	1	1		
106	Camera Electronic	4	4		
107	Tripod Camera	4	4		
108	Ligjting Stand Tripod	1	1		
109	Lensa kamera	2	2		
110	Film Sound Recorder	1	1		
111	Mixer PVC	6	5	1	
112	Handy Talky (HT)	23	18		5
113	Faximile	4	4		
114	Alat Olah Raga Lainnya	17	15	1	2

Sumber : Bagian Umum Setdako Padang Panjang, Oktober 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja pelayanan, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Jika ditinjau dari segi urusan, Sekretariat Daerah menyelenggarakan beberapa urusan, antara lain : urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian dan urusan pertanahan. Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat daerah dan realisasi Keuangan Dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-					
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Jumlah tanah yang diadakan				3 lokasi	-	-	-	-	2 lokasi	-	-	-	-	-	67%			
2	Jumlah Penyelesaian masalah tanah yang dilaksanakan		4 paket		1 masalah	-	-	-	-	2 paket	1 masalah	-	-	-	50%	100%			
3	Jumlah Batas kecurahan di Kota Padang Panjang			16 kecurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	-	1 Dokumen	16 kecurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	-	1 Dokumen	100%	100%	100%		100%	
4	Jumlah sekolah sehat yang dibina			TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 2 SD : 2 SMP : 2 SMA : 2 (8 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	TK : 1 SD : 1 SMP : 1 SMA : 1 (4 sekolah)	200%	100%	100%		100%	
5	Jumlah peringatan hari-hari besar Islam			8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	8 HBI	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi		2 kegiatan		3 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	11 kegiatan	6 kegiatan	12 kegiatan	9 kegiatan	100%	367%	120%	240%	180%	
7	Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ			2,8 Milyar	2,8 Milyar	3 Milyar	3 Milyar	Rp. 3.040 Milyar	Rp. 2.822.145.487	Rp.3,4 Milyar	Rp.3.792 Milyar	Rp.3.106 Milyar	Rp. 3.080.722.627	101%	121%	126%	104%	101%	
8	Jumlah Perda yang ditetapkan			8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	10 Perda	13 Perda	11 Perda	-	5 Perda	125%	163%	138%	0%	63%	
9	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan			20 Perwako	20 Perwako	15 Perwako	15 Perwako	15 Perwako	26 Perwako	26 Perwako	50 Perwako	44 Perwako	67 Perwako	130%	130%	333%	293%	447%	
10	Terdokumentasinya dan tersebarluasnya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	150%	100%	
11	Penyuluhan Hukum			4 kegiatan	4 kali kegiatan	-	-	-	4 kegiatan	4 kali kegiatan	-	-	-	100%	100%				
12	Laporan RANHAM			2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	1 Laporan	0 laporan	-	-	-	50%	0%				
13	Tersedianya dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja, LKPD dan LPPD			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	100%	100%	100%	100%	117%	
14	% SKPD yang telah menyampaikan laporan SPM			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Nilai IKM			Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik						
16	Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja			75%	75%	75%	40%	75%	74,38%	62,96%	54,25%	58,33%	54,17%	99%	84%	72%	146%	72%	
17	Terlaksananya koordinasi dan monev penyaluran RASKIN			16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	-	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	-	100%	100%	100%	100%		
18	Terlaksananya Pembinaan dan Monev Perkembangan KPRI			-	26 KPRI	26 KPRI	30 KPRI	30 KPRI	-	26 KPRI	26 KPRI	30 KPRI	30 KPRI	100%	100%	100%	100%		

19	Terlaksananya kajian lembaga Pengelolaan Pasar			-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-				100%	
20	Terlaksananya koordinasi kebijakan Pengelolaan			-	-	-	1 tahun	-	-	-	-	1 tahun	-					100%
21	Terlaksananya kajian perusahaan daerah			2 kajian	1 BUMD	1 kegiatan			2 kajian	1 BUMD	1 kegiatan	-		100%	100%	100%		
22	Tersusunnya seleksi DirekturBUMD			-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	-				100%	
23	Terlaksananya fasilitasi dan Pembinaan BUMD			-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	3 kali					100%
24	Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah			1 rakor	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 Monev	3 kali	3 kali	1 rakor	2 rakor dan 1 sosialisasi	3 Monev	3 kali	3 kali	100%	100%	100%	100%	100%
25	Terlaksananya Pembinaan dan Monv Sumber Daya			-	-	-	4 kali	-	-	-	-	4 kali	-				100%	
26	Terinventarisir dan Tersosialisasi dengan baik profil Bank dan Lembaga Keuangan non Bank di Kota Padang Panjang			-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	1 laporan					100%
27	Terlaksananya kajian Produksi Pangan dan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang			-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen					100%
28	Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan			-	11 bulan	11 bulan	12 bulan	12 bulan	-	11 bulan	11 bulan	12 bulan	12 bulan		100%	100%	100%	100%
29	Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan			75%	80%	86%	85%	100%	73,22%	97%	97,82%	99%	97,99%	98%	121%	114%	116%	98%
30	Meningkatnya pengetahuan PA, KPA, panitia pejabat pengadaan serta PPK pengadaan barang dan jasa Pemerintah			80%	90 orang	90 orang	100%		72%	90 orang	90 orang	100%		90%	100%	100%	100%	
31	Meningkatnya persentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh LPSE			100%	100%	100%	100%		90%	100%	100%	100%		90%	100%	100%	100%	
32	Meningkatnya persentase jumlah panitia pejabat pengadaan PPK dalam mengoperasikan LPSE			90%	95%	100%	100%		80%	100%	100%	100%		89%	105%	100%	100%	
33	Terlaksananya pendidikan/ sosialisasi LPSE, SIRUP dan monv online			-	100%	100%	100%	96 orang	-	100%	100%	100%	96 orang		100%	100%	100%	100%
34	Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi			-	-	-	85%	6 laporan	-	-	-	85%	-				100%	0%
35	Penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Massa			35 Media cetak	35 Media cetak	35 Media Cetak	45 Media Cetak	-	44 Media	- 57 Media	49 Media Cetak	45 Media Cetak	-	126%	163%	140%	100%	
				- 8 portal	- 8 portal	8 portal	5 Media online	-	- 8 portal	- 5 portal	8 portal	5 Media online	-	100%	63%	100%	100%	

				- 3 stasiun televisi	- 3 stasiun televisi	3 stasiun televisi	4 Media Elektronik	-	- 3 stasiun televisi	- 2 stasiun televisi	2 stasiun televisi	4 Media Elektronik	-	100%	67%	67%	4/4*100%	
				- 2 radio	- 2 radio	2 radio	-	-	- 2 radio	- 2 radio	2 radio	-	-	100%	100%	100%		
36	Terpublitasinya kegiatan pembangunan kota Padang Panjang			-	-	-	-	1 Dokumen Visual, 1 Dokumen Audio Visual	-	-	-	-	1 Dokumen Visual, 1 Dokumen Audio Visual					100%
37	Terlaksananya Pelatihan Keprotokolan			-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	50 orang					100%
38	Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID pembantu (%)			- 27 SKPD	- 27 SKPD	27 SKPD	-	-	- 27 SKPD	- 27 SKPD	27 SKPD	-	-	100%	100%	100%		
				- 1 Sekretariat KPU	- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	-	-	- 1 Sekretariat KPU	- 1 Sekretariat KPU	1 Sekretariat KPU	-	-	100%	100%	100%		
				-	- 15 UPTD	15 UPTD	-	-	-	- 15 UPTD	15 UPTD	-	-	100%	100%			
39	Ditetapkannya Daftar Informasi Publik (%)			8 informasi berkala	- 10 informasi berkala	10 informasi berkala	-	-	8 informasi berkala	- 10 informasi berkala	10 informasi berkala	-	-	100%	100%	100%		
				8 informasi setiap saat	- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat	-	-	8 informasi setiap saat	- 10 informasi setiap saat	10 informasi setiap saat	-	-	100%	100%	100%		
				- 2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	2 informasi serta merta	-	-	- 2 informasi serta merta	- 2 informasi serta merta	2 informasi serta merta	-	-	100%	100%	100%		
40	Jumlah kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			100 kegiatan	120 Kegiatan	100 Kegiatan	-	84 kegiatan	112 kegiatan	411 Kegiatan	180 Kegiatan	-	96 kegiatan	112%	343%	180%		114%
41	Tersusunnya Rencana dan Pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah			-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen				100%	100%

	Pembelian Buku Cetak	Peningkatan Fasilitas Kota Padang Panjang		47.800.000	39.873.000	89.827.900	82.383.000	131.883.000	42.351.100	33.478.120	74.862.467	60.960.000	31.142.777	5.949.289	6.486.479	29.229.253	21.940.000	38.857.733	81.162.500	68.547.339
	Peningkatan Mutu Hutan Bagi Masyarakat	Terdorong Boga Paksi bagi masyarakat perkebun kelapa sawit di Kota Padang Panjang		41.400.000	-	-	23.000.000	23.000.000	-	-	-	-	-	41.400.000	-	-	23.000.000	23.000.000	44.380.000	-
	Pengelolaan Hutan dan Sempadan Perairan Daerah Tak Dikeur dan Dialek oleh Masyarakat di Kota Padang Panjang	Teknisannya Sempadan Perairan di Kota Padang Panjang		40.910.000	33.410.000	-	-	37.380.000	48.144.000	41.965.000	-	-	24.734.200	12.785.800	6.416.100	-	-	12.905.000	38.338.000	23.779.520
	Pelatihan Hutan dan Sempadan Perairan			-	41.150.000	-	-	-	-	28.540.000	-	-	-	-	19.810.000	-	-	-	8.430.000	1.388.000
	Pelatihan Legal Enabling			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Masyarakat Kota Padang Panjang			32.770.000	37.117.000	-	-	26.994.400	34.681.000	-	-	-	-	5.710.500	2.921.000	-	-	-	11.879.000	12.230.070
	Studi dan Pelaksana Pelaksanaan RZAMD	Teknisannya Rencana Aksi Nasional RZAMD di Kota Padang Panjang		23.020.000	12.890.000	-	-	6.880.000	16.470.000	-	-	-	393.000	16.082.000	12.080.000	-	-	6.534.400	9.146.000	2.157.220
	Diseminasi Hutan Bagi Masyarakat Kota Padang Panjang			-	28.280.000	-	-	-	-	32.384.000	-	-	-	-	19.821.000	-	-	-	8.041.000	2.479.270
	Pelatihan Hutan dan Sempadan Perairan			11.420.000	-	-	-	-	11.944.000	-	-	-	-	5.220.000	-	-	-	-	3.389.000	2.739.890
Terdorong	Program Peningkatan Mutu Hutan dan Sempadan Perairan	Program Peningkatan Mutu Hutan dan Sempadan Perairan		48.390.000	238.040.000	339.225.000	311.549.000	190.480.000	-	128.660.875	176.357.725	57.013.200	19.152.000	46.700.000	96.489.125	31.967.375	4.986.000	91.340.000	131.877.000	37.424.700
	Fasilitas Perikanan			48.390.000	20.290.000	-	-	-	-	11.031.700	-	-	-	49.390.000	6.716.200	-	-	-	13.440.000	2.389.740
	Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Kota Padang Panjang	Teknisannya pelatihan Keterampilan Masyarakat Kota Padang Panjang		-	117.690.000	199.859.000	-	81.280.000	-	112.478.000	137.371.025	-	-	-	4.882.000	2.351.475	-	81.300.000	41.757.000	46.950.395
	Pembinaan Masyarakat Kota Padang Panjang			-	21.130.000	-	-	-	-	12.044.910	-	-	-	-	6.936.020	-	-	-	4.300.000	2.988.690
	Fasilitas Perikanan dan Perikanan			-	31.580.000	32.900.000	-	-	2.644.200	23.014.700	-	-	-	-	12.800.000	4.820.100	-	-	21.470.000	8.922.780
	Pengembangan Hutan dan Sempadan Perairan	Teknisannya penelitian dan Pengembangan Hutan dan Sempadan Perairan		-	-	65.300.000	81.680.000	27.200.000	-	-	48.700.000	57.013.200	15.152.000	-	-	24.590.000	4.880.000	12.040.000	38.000.000	22.574.940
	Program Peningkatan Mutu Hutan dan Sempadan Perairan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Masyarakat Kota Padang Panjang			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Mutu Hutan dan Sempadan Perairan			-	31.675.500	-	-	-	-	42.518.000	-	-	-	-	26.487.400	-	-	-	14.700.000	8.800.830
	Melakukan Pengembangan Perikanan			-	30.570.000	-	-	-	-	17.084.200	-	-	-	-	3.326.000	-	-	-	4.716.000	1.450.240
	Peningkatan Mutu Hutan dan Sempadan Perairan			-	38.017.000	-	-	-	-	17.680.200	-	-	-	-	21.387.170	-	-	-	7.802.000	3.520.000
	Pembinaan Masyarakat Kota Padang Panjang			-	14.380.000	-	-	-	-	12.618.500	-	-	-	-	1.761.470	-	-	-	2.016.000	2.927.300
Terdorong	Program Peningkatan Mutu Hutan dan Sempadan Perairan	Program Peningkatan Mutu Hutan dan Sempadan Perairan		11.890.000	-	-	-	-	12.970.100	-	-	-	-	5.387.000	-	-	-	-	1.184.000	2.514.620
	Fase Konvensional			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Program dan Kebijakan Kota Padang Panjang			15.910.000	-	-	-	-	12.671.100	-	-	-	-	2.387.000	-	-	-	-	1.694.000	2.514.620

Tercapainya Peningkatan dan Kesejahteraan Masyarakat		Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2019																										
Indikator Kinerja Utama (IKU)		Rincian Anggaran																										
Kategori		Detail Anggaran																										
Tercapainya Peningkatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan di Kota Padang Panjang. Kondisi tersebut dapat menjadikan tantangan dan memberi peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah. Berdasarkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang, bentuk tantangan pelayanan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tantangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupaya mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja kebijakan SDA/LH, meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan,

mengembangkan ekonomi, membina BUMD serta mewujudkan kehidupan manusia yang Islami.

Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
3. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
4. Tersedianya Anggaran

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali analisis isu-isu strategis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2023

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

Penyusunan kebijakan belum begitu optimal. Tak jarang kebijakan justru muncul di lembaga teknis sementara kedudukan lembaga teknis sejatinya adalah sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman atau beda pemahaman antara Sekretariat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD dengan Sekretariat Daerah.
- c. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 = 2.996/Tinggi
- d. Akuntabilitas Kinerja Kota Tahun 2017 sebesar 54,17 katagori CC, Pada tahun 2018 meningkat kurang signifikan dengan nilai 58,69 / katagori CC.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pendataan Rupa Bumi Buatan di Kota Padang Panjang.
- f. Belum Maksimalnya evaluasi produk hukum daerah
- g. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat.
- h. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Seiring dengan telah berakhirnya periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJM Nasional. RPJMD tersebut memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Visi dan Misi Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut:

3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Maka yang menjadi Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”

Berikut ini penjabaran dari visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang tersebut :

Untuk Kejayaan Padang Panjang memiliki arti menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*;

Bermarwah memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi “Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah” diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakat. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus bergerak bersama, pemerintahnya menjunjung amanah membangun negeri, rakyat berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah;

Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluralitas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui

Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan- perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi diberbagai bidang.

3.2.2. Misi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Padang Panjang dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsive, Inovatif dan Partisipatif

3.3. Telaahan Renstra Propinsi

Penelaahan Dokumen perencanaan Renstra Sekretariat Daerah dengan Renstra Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menyelaraskan dan

dapat memberikan dukungan pencapaian Visi, Misi Propinsi. Adapun Visi dari Gubernur Sumatera barat adalah:

“ Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Dari Visi ini ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais dan budaya berdasarkan filosofi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari Visi dan Misi Propinsi di atas selaras dengan Vsi, Misi Walikota Panjang Panjang yang menjadi capaian Renstra Sekretariat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai fungsi kordinasi ada Program yang berhubungan dengan tataruang yaitu Penataan Daerah Otonomi Baru.

3.5. Isu-Isu Strategis

Dalam perumusan isu-isu strategis diperlukan sebuah kajian dan analisis untuk dapat mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan dan Peluang serta Tantangan yang ada, Pendekatan yang lazim dilakukan dalam analisis Isu Strategis adalah Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity and Threat). sebuah analisis yang membagi dua analisis yakni analisis terhadap lingkungan internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) serta melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Dengan pendekatan tersebut pada yang menjadi Isu strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dapat sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah.
2. Tingkatkan Motivasi Kerja dan Disiplin Pegawai dengan memanfaatkan Program Peningkatan Kapasitas Pegawai.
3. Optimalisasi komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Kewenangan Setdako
4. Tingkatkan pembinaan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas untuk menghindari ego sektoral.
5. Optimalkan komunikasi dan koordinasi dalam peningkatan kapasitas pegawai dalam motivasi dan disiplin pegawai.
6. Optimalisasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Optimalisasi pelaksanaan pendataan Rupa Bumi Buatan di Kota Padang Panjang
8. Peningkatan evaluasi produk hukum daerah.
9. Meningkatkan Evaluasi tentang Peraturan-Peraturan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat
10. Optimalisasi penataan kelembagaan perangkat daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni “ **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**, maka dengan potensi, peluang, tantangan dan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama 5 (lima tahun) ke depan sebagai mana Tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Sasaran Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah		Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)
		Nilai LKPPD	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani		Indek Kepuasan Masyarakat	78 (baik)	79 (baik)	80 (baik)	81 (baik)	82 (baik)
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Minimal	84,67	86,33	87,83	89,67	92,50
Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat		Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid	38,82	56,58	74,34	90,79	100
	Meningkatkan aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid	38,82	56,58	74,34	90,79	100
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah		Persentase Keberhasilan Terselenggaranya Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan	70,00	77,50	80,00	85,00	87,50
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang	70	80	85	90	90
	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah	Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	70	75	75	80	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

Secara spesifik, kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman pelaksanaan, berisikan tindakan-tindakan tertentu, sehingga kebijakan tersebut dapat berupa kumpulan keputusan yang mempunyai sifat-sifat :

1. Berupa pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan
3. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
4. mengarah kepada kondisi-kondisi dimana para pelaksana yang akan melaksanakan mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan Sekretariat Daerah merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, maka menurut targetnya, kebijakan Sekretariat Daerah terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang diakomodir dan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Sedangkan kebijakan eksternal pada umumnya kebijakan yang diterbitkan dan diarahkan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan SOPD dan masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan yang telah dirumuskan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana Strategis yang efektif , sehingga elemen Strategi pada dasarnya meliputi :

- upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;

- Sebagai hasil tindak lanjut perumusan faktor kunci keberhasilan, misi dan visi organisasi, yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan;
- harus mampu untuk memberikan arah dan dorongan kepada pelaksana kegiatan; dan
- dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan itu, maka strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana Tabel 5.1

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Visi	: UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT		
Misi : 2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan Berbudaya			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat	Persentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid	Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat melalui gerakan "Gelora Serambi Mekkah"	Peningkatan Pembinaan pada aktifitas keagamaan, sosial dan budaya
Misi : 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik	Pengembangan inovasi dalam penyelesaian pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan penyempurnaan kebijakan sektor Perekonomian yang tercantum dalam RPJMD 2. Mendorong OPD terkait untuk menyelenggarakan kebijakan sektor perekonomian sesuai dengan Renstra, Renja dan jadwal yang sudah ditetapkan 3. Mengawal agar kebijakan sektor perekonomian yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan perencanaan program koordinasi perekonomian daerah 2. Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Perekonomian Kota Padang Panjang 3. Menyelenggarakan Rapat-Rapat Koordinasi dengan OPD yang terkait dengan Sektor Perekonomian secara berkala 4. Medorong penguatan ketersediaan data sektor perekonomian 5. Melaksanakan monitoring lapangan secara rutin terhadap seluruh objek kebijakan ekonomi 6. Mengkoordinasikan Pengendalian Inflasi Daerah 7. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang
	Meningkatnya kualitas kebijakan pencapaian pembangunan daerah	Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang undangan	Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi Kegiatan pembangunan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih telah dirumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang ingin dicapai, maka disusun Program kerja Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2018-2023. Berdasar rumusan Tujuan, Sasaran yang telah dirumuskan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dijabarkan menjadi Program kegiatan. Program Kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan adalah sebagai Tabel 6.1

Tabel.6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan				Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		B (60,1)		BB (65)		BB (70,1)		BB (75)		A (80,02)		A (80,02)	
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			Nilai Sakip		B (60,1)		BB (65)		BB (70,1)		BB (75)		A (80,02)		A (80,02)	
				Nilai LKPPD		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran		90%	7.279.092.000	90%	5.988.570.400	90%	6.304.892.000	90%	6.304.892.000	90%	6.304.892.000	0,9	32.182.338.400
			Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat		250 lbr Perangko, 3000 lbr materai 6000, 2500 lbr Materai 3000	27.000.000										27.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan		1 Tahun	324.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	324.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara		Roda 6 4 unit, Roda 4 28, Roda 2 48 Uni, 22 orang Sopir	1.832.432.000	80 Unit	1.740.810.400	80 Unit	1.832.432.000	80 Unit	1.832.432.000	80 Unit	1.832.432.000	80 Unit	9.070.538.400
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan		2 unit	358.675.000	2 unit	358.675.000	2 unit	358.675.000	2 unit	358.675.000	2 unit	358.675.000	2 unit	1.793.375.000
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan		1 Tahun	49.500.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	49.500.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 Tahun	120.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	120.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia		1 Tahun	50.000.000	9	-	0	0	0	-	0	-	0	50.000.000

		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan		1 Tahun	536.200.000	11,407	536.200.000	11,407	536.200.000	11,407	536.200.000	11,407	536.200.000	11,407	2.681.000.000	
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dipekerjakan		3 Orang 1 Tahun	325.115.000	58	325.115.000	58	325.115.000	58	325.115.000	58	325.115.000	58	1.625.575.000	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti		1 Tahun	3.074.200.000	1400	2.476.970.000	1400	2.681.970.000	1400	2.681.970.000	1400	2.681.970.000	1400	13.597.080.000	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		1 Tahun	531.970.000										531.970.000	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan gedung kantor yang disediakan		1 Tahun	50.000.000										50.000.000	
		Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan - Jumlah Jenis alat tulis kantor yang disediakan				3 jenis	181.800.000	3 jenis	196.500.000	3 jenis	196.500.000	3 jenis	196.500.000	3 jenis	771.300.000	
		Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	- Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia - Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi				9 dan 22	369.000.000	9 dan 22	374.000.000	9 dan 22	374.000.000	9 dan 22	374.000.000	9 dan 22	1.491.000.000	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			90%	7.821.380.000	90%	3.889.130.000	90%	4.490.793.250	90%	2.444.412.238	90%	2.536.074.073	90%	21.181.789.561
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		270 Unit	644.200.000	657 Unit	1.050.110.000	600 Unit	812.085.750	600 Unit	895.704.738	657 Unit	825.242.354	2784 Unit	4.227.342.842	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Walikota/Wawako	Jumlah kendaraan dinas Walikota/Wakil Walikota yang diadakan		1 Unit	796.650.000			2 Unit	1.500.000.000		-		-	3 Unit	2.296.650.000	
		Pengadaan Kendaraan dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan						1 Unit	600.000.000					1 unit	600.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 unit	200.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	180.000.000	1 unit	890.000.000	

	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan		85 unit	781.030.000	85 unit	300.000.000	85 unit	400.000.000	85 unit	400.000.000	85 unit	300.000.000	425 unit	2.181.030.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		3 Unit	50.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	80.500.000	4 Unit	80.500.000	4 Unit	106.461.250	4 Unit	387.461.250
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara		2 unit	100.000.000	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara		15 unit	75.000.000	15	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	- Jumlah rumah jabatan yang dipelihara - Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang dipelihara				2 dan 15	200.000.000	2 dan 15	229.187.500	2 dan 15	229.187.500	2 dan 15	435.350.469	2 dan 15	1.093.725.469
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		120 unit%	124.500.000	14									124.500.000
	Rehab Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat		1 unit	3.000.000.000	1 unit	900.000.000							1 unit	3.900.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/ berat		2 Unit	2.050.000.000	2 Unit	500.000.000							2 Unit	2.550.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan Kantor	- Jumlah alat kantor yang dipelihara - Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia				120 Unit 14 Jenis	689.020.000	1230 Unit 14 Jenis	689.020.000	140 Unit 14 Jenis	689.020.000	140 Unit 14 Jenis	689.020.000	150 Unit 14 Jenis	2.756.080.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		84	120.000.000	85	108.000.000	85	200.000.000	86	200.000.000	87	200.000.000	87	828.000.000
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yng mengikuti Bimtek		15 orang	120.000.000	15 orang	108.000.000	15 orang	200.000.000	25 orang	200.000.000	25 orang	200.000.000	95 orang	828.000.000
4	Program Keprotokoleran	Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana		100%	0	100%	2.089.067.500	100%	1.711.262.625	100%	1.835.679.269	100%	1.962.595.272	100%	7.598.604.666

	Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi	-	0	24 kali	65.000.000	24 kali	65.000.000	24 kali	100.000.000	24 kali	165.000.000	96 kali	395.000.000
	Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Jumlah dokumen Pidato yang disusun	-	84 dokumen	65.220.000	84 dokumen	65.220.000	84 dokumen	154.636.644	84 dokumen	165.220.000	336 Dokumen	450.296.644	
	Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan	0	144 kali	458.847.500	144 kali	581.042.625	144 kali	581.042.625	144 kali	632.375.272	576 kali	2.253.308.022	
	Perwakilan Pemda Padang Panjang di Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana		4 paket	1.500.000.000	4 paket	1.000.000.000	4 paket	1.000.000.000	4 paket	1.000.000.000	4 paket	4.500.000.000	
5	Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP sesuai dengan target Kota	13	0	13	144.000.000	13	144.000.000	18	144.000.000	18	144.000.000	24	576.000.000
	Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LAKIP			1 Dokumen	144.000.000	1 Dokumen	144.000.000	1 Dokumen	144.000.000	1 Dokumen	144.000.000	5 Dokumen	576.000.000
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kinerja,			12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	60 Laporan		
		Jumlah perjanjian Kinerja yang dihasilkan			2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	8 Dokumen		
		Persentase Ketercapaian IKU Kota			60%		70%		75%		80%	80%		
6	Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	Jumlah penataan Kelembagaan	1kali	113.075.000	3kali	132.800.000	1 kali	132.800.000	1 kali	82.800.000	1 kali	157.800.000	7 kali	619.275.000
		Jumlah Dokumen Tatalaksana	2 Dokumen		3 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		11 Dokumen	
	Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	1 kali	10.600.000	1 kali	12.800.000	1 kali	12.800.000	1 kali	12.800.000	1 kali	12.800.000	5 kali	61.800.000
	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun			1 Dokumen	40.000.000						1 Dokumen	40.000.000	
	Penerapan kelas jabatan dalam sistem merit manajemen ASN	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perubahan paradigma Manajemen ASN dalam menyikapi sistem merit berdasarkan kelas jabatan	60 orang	39.600.000			60 orang	40.000.000			60 orang	40.000.000	180 orang	119.600.000

		Penyusunan Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan			17 Kelas Jabatan	40.000.000			17 Kelas Jabatan	50.000.000			17 Kelas Jabatan	90.000.000		
		Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan struktural		1 Dokumen		18.500.000			1 Dokumen	20.000.000			1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	63.500.000
		Pembinaan SOP	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan SOP		24 OPD		14.375.000		-	24 OPD	20.000.000	24 OPD	20.000.000	24 OPD	20.000.000	24 OPD	74.375.000
		Evaluasi Pelaksanaan SOTK	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		1 Dokumen		30.000.000									1 Dokumen	30.000.000
		Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi							1 Dokumen	40.000.000			1 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	100.000.000
		Penyusunan Peta Proses Bisnis	Peta Proses Bisnis			1 Dokumen	40.000.000									1 Dokumen	40.000.000
7		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan kepala daerah		100%		3.565.435.000	100%	3.000.000.000	100%	3.185.000.000	100%	16.350.000.000	100%	3.600.000.000	100%	29.700.435.000
		Operasional Rumah Jabatan KDH/WKDH	Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah		48 Jenis		2.600.335.000										2.600.335.000
		Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi		24 kali		65.000.000										65.000.000
		Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah	Jumlah dokumen Pidato yang disusun		84 Dokumen		65.220.000										65.220.000
		Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar Nasional yang dilaksanakan		6 kali		211.000.000										211.000.000
		Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang	Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang panjang yang dilaksanakan		2 kali		98.320.000										98.320.000
		Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan		144 kali		361.110.000										361.110.000
		Pelaksanaan Kegiatan APEKSI	Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti		2 kali		100.000.000										100.000.000

		Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah	10 orang	64.450.000										64.450.000
		Penunjang Operasional Walikota dan Wakil walikota	Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah	-	-	7 jenis	2.778.450.000	7 jenis	2.952.372.500	7 jenis	16.105.741.125	7 jenis	3.343.528.181	7 jenis	25.180.091.806
		Penunjang Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah yang difasilitasi	-	-	48 kali	221.550.000	48 kali	232.627.500	48 kali	244.258.875	48 kali	256.471.819	48 kali	954.908.194
8		Program Kerjasama Informasi dengan Media masa	Jumlah media pubikasi dan share informasi berbagai kegiatan KDH dan pemerintah daerah	1 Media	302.080.000										302.080.000
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen informasi pembangunan kota Padang Panjang yang disebarluaskan	4 Dokumen	302.080.000										302.080.000
9		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan	2 kecamatan	58.000.000	2 kecamatan	66.700.000	2 kecamatan	66.700.000	2 kecamatan	66.700.000	2 kecamatan	66.700.000	2 kecamatan	324.800.000
		Pengasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen Pembentukan Koordinat titik Batas antar Wilayah yang disusun	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	34.500.000	1 dokumen	34.500.000	1 dokumen	34.500.000	1 dokumen	34.500.000	5 dokumen	168.000.000
		Penamaan rupa bumi dan unsur alami	jumlah objek rupa bumi yang telah dipetakan	1 dokumen	28.000.000	1 dokumen	32.200.000	1 dokumen	32.200.000	1 dokumen	32.200.000	1 dokumen	32.200.000	5 dokumen	156.800.000
10		Program Penyelenggaraan dan Pelaporan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	3,10	7.300.000	3,14	408.035.500	3,15	453.363.325	3,20	505.490.324	3,25	700.436.372	3,25	2.074.625.521
			LKPJ	Diterima		Diterima		Diterima		Diterima		Diterima		Diterima	
		Penilaian Kompetensi Camat, Lurah,	Jumlah camat & Lurah, RT yang dinilai Kompetensinya	18 orang	7.300.000	18 orang	15.000.000	18 orang	15.000.000	18 orang	15.000.000	18 orang	15.000.000	90 orang	67.300.000
		Penyusunan Buku LKPJ Wako	Jumlah Buku LKPJ wako			1 buku	27.600.000	1 buku	27.600.000	1 buku	27.600.000	2 buku	77.600.000	5 buku	160.400.000
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun			1 Dokumen	63.250.000	1 Dokumen	63.250.000	1 Dokumen	63.250.000	2 Dokumen	98.250.000	5 Dokumen	288.000.000
		Pembuatan Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023	Jumlah Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023	0	0	0	-	0	0	0	-	1 buku	50.000.000	1 buku	50.000.000

11	Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang	Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang panjang yang dilaksanakan,	0	0	2 kegiatan	112.105.500	2 kegiatan	112.105.500	2 kegiatan	147.732.430	2 kegiatan	171.242.294	8 kegiatan	543.185.724
		Jumlah Tokoh Masyarakat yang diberi penghargaan	0	0	10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		40 orang	
	Pelaksanaan Kegiatan APEKSI	Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti	0	0	2 kali	110.000.000	2 kali	132.250.000	2 kali	143.087.500	2 kali	165.900.625	8 kali	551.238.125
	Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah			15 orang	69.280.000	15 orang	92.357.825	15 orang	98.020.394	15 orang	111.643.453	60 orang	371.301.672
	Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah bidang Fasilitas pencapaian SPM			6 bidang	10.800.000	6 bidang	10.800.000	6 bidang	10.800.000	6 bidang	10.800.000	6 bidang	43.200.000
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP < 50	8	243.346.250		-	0	-	0	-	0	-	0	243.346.250
	Penyusunan LAKIP Kota Padang Panjang	Jumlah buku LAKIP Kota Padang Panjang	1 Dokumen	86.756.250	0	-	0	0	0	-	0	-	-	86.756.250
		Persentase ketercapaian IKU Kota	58%											0
	Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang	Jumlah dokumen Laporan evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang	13 Dokumen	31.300.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	31.300.000
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	16.320.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	16.320.000
Penyusunan Buku LKPJ Wako	Jumlah Dokumen LKPJ Wako	1 Dokumen	24.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	24.000.000	
Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD)	1 Dokumen	55.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	55.000.000	
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	12 kali	29.970.000	0	-	0	0	0	-	0	-	-	29.970.000	

12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	90%	720.890.000	90%	761.500.000	90%	761.500.000	100%	761.500.000	100%	761.500.000	100%	3.766.890.000
		Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	Penyelesaian Masalah Hukum Penda dan Masalah Hukum Masyarakat	Jumlah laporan permasalahan hukum pemerintah daerah dan masyarakat yang difasilitasi serta perkara dibidang perdata dan TUN yang diselesaikan	1 laporan	0	2 laporan	460.000.000	2 laporan	460.000.000	2 laporan	460.000.000	2 laporan	460.000.000	8 laporan	1.840.000.000
	Penyelesaian Masalah Hukum Penda	Jumlah permasalahan hukum Pemerintahan Daerah	1 laporan	427.150.000	-	-	-	0	-	-	-	-	1 laporan	427.150.000
	Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah	- Jumlah peraturan daerah - Peraturan kepala daerah yang dihasilkan	- 8 Perda - 20 Perwako	122.000.000	8 Perda dan 25 Perwako	130.000.000	8 Perda dan 25 Perwako	130.000.000	8 Perda dan 25 Perwako	130.000.000	8 Perda dan 25 Perwako	130.000.000	40 Perda dan 120 Perwako	642.000.000
	Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran Daerah	- Jumlah buku lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan - Jumlah Produk Hukum yang diupload dalam Web JDIIH	- 450 buku - 450 buku	96.000.000	- 200 buku - 200 buku	100.000.000	- 200 buku - 200 buku	100.000.000	- 200 buku - 200 buku	100.000.000	- 200 buku - 200 buku	100.000.000	- 1.250 buku - 1.250 buku	496.000.000
	Penyelesaian Masalah Hukum Bagi Masyarakat	Jumlah Masalah Hukum Masyarakat yang difasilitasi	1 laporan	20.000.000	0	-	0	0	0	-	0	-	0	20.000.000
	Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	45.740.000	0	-	0	0	0	-	0	-	200 orang	45.740.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			200 orang	60.000.000	200 orang	60.000.000	200 orang	60.000.000	200 orang	60.000.000	800 orang	240.000.000
	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM	Jumlah laporan Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang yang disusun	1 laporan	10.000.000	1 laporan	11.500.000	1 laporan	11.500.000	1 laporan	11.500.000	1 laporan	11.500.000	5 laporan	56.000.000

Terselenggaranya Pelayanan Publik yang berkualitas dan Melayani			Indek Kepuasan Masyarakat		78 (baik)		79 (baik)		80 (baik)		81 (baik)		82 (baik)		82 (baik)	
Meningkatnya Pelayanan Publik			Standar Pelayanan Minimal		84,67		86,33		87,83		89,67		92,50		92,50	
	13	Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		3,45	3,25	438.730.000	3,30	404.947.500	3,35	458.189.625	3,40	519.418.069	3,45	589.830.779	3,45	2.411.115.973
		Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah bidang Fasilitasi pencapaian SPM		6 bidang	10.080.000									6 bidang	10.080.000
		Pembinaan Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan Baku Mutu Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang		24 OPD	50.000.000	24 OPD	50.000.000	24 OPD	50.000.000	24 OPD	50.000.000	24 OPD	50.000.000	24 OPD	250.000.000
		Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Layanan yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat		20 Unit Layanan	308.650.000	24 Unit Layanan dan 1 Dokumen	354.947.500	24 Unit Layanan	408.189.625	24 Unit Layanan	469.418.069	24 Unit Layanan	539.830.779	24 Unit Layanan	2.081.035.973
		Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001	Jumlah evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan		1 kali	70.000.000									1 kali	70.000.000
Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat			Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		38,82		56,58		74,34		90,79		100		100	
Meningkatkan aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat			Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		38,82		56,58		74,34		90,79		100		100	
	14	Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan keagamaan	Peringkat prestasi Kafilah MTQ Kota Padang Panjang di Tingkat Propinsi		Peringkat 9	9.360.475.000		8.668.730.000	Peringkat 8	10.771.415.200	-	9.924.270.424	Peringkat 7	11.192.362.864	Peringkat 7	49.917.253.488
			Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat propinsi		1 sekolah		2 sekolah		3 sekolah		4 sekolah		5 sekolah		5 sekolah	

	SMART SURAU	Jumlah Surau Yang Telah Melaksanakan Kegiatan Smart Surau	0		4 Unit	365.000.000	4 Unit	375.000.000	4 Unit	350.000.000	4 Unit	250.000.000	16 Unit	1.340.000.000
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS se Kota Padang Panjang yang dibina	4 Sekolah	169.125.000	4 Sekolah	170.000.000	4 Sekolah	170.000.000	4 Sekolah	170.000.000	4 Sekolah	170.000.000	4 Sekolah	849.125.000
	Muzakarah Ulama Kota	Jumlah Rumusan yang dihasilkan pada Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang	4 rumusan	109.175.000	4 rumusan	125.000.000	4 rumusan	125.000.000	4 rumusan	125.000.000	4 rumusan	125.000.000	4 rumusan	609.175.000
	Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam yang diselenggarakan	Jumlah peringatan Hari-hari Besar Islam yang diselenggarakan	8 Kegiatan	157.100.000	8 Kegiatan	170.000.000	8 Kegiatan	170.000.000	8 Kegiatan	170.000.000	8 Kegiatan	170.000.000	8 Kegiatan	837.100.000
	Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ	- Persentase guru TPQ/TPSQ yang bersertifikasi	0	123.625.000	60 TPQ/TPSQ	130.000.000	5 TPQ/TPSQ	130.000.000	75 TPQ/TPSQ	130.000.000	100 TPQ/TPSQ	130.000.000	100 TPQ/TPSQ	643.625.000
		- Jumlah TPQ/TPSQ Yang Mengikuti Khatam Bersama	35 TPQ		37 TPQ		39 TPQ		41 TPQ		43 TPQ		43 TPQ	
		- Jumlah Lembaga Didikan Shubuh Yang Dinilai	8		8		8		10		12		112	
	Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan	Jumlah Masjid Yang Dikunjungi	12 Masjid	190.200.000	14 Masjid	218.730.000	16 Masjid	251.539.500	18 Masjid	289.270.424	20 Masjid	332.600.989	20 Masjid	1.282.340.913
	Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid dan Garin/Petugas Kebersihan Mesjid/Mushalla Kota Padang Panjang	- Jumlah guru TPQ yang diberi honor	250 orang	4.930.075.000	250 orang	5.100.000.000	250 orang	5.100.000.000	250 orang	5.100.000.000	250 orang	5.100.000.000	250 orang	25.330.075.000
		- Jumlah Imam masjid yang difasilitasi honor	40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang	
		- Garin Masjid/ Petugas kebersihan yang difasilitasi honor	115 Orang		115 Orang		115 Orang		115 Orang		115 Orang		115 Orang	
		- khatib cadangan yang difasilitasi honor	40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang		40 Orang	
	Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji	Jumlah jemaah haji yang difasilitasi keberangkatan dan penjemputannya	225 Orang	196.100.000	225 Orang	200.000.000	225 Orang	200.000.000	225 Orang	200.000.000	225 Orang	200.000.000	225 Orang	996.100.000
	Persiapan (TC) dan Pelaksanaan Mengikuti MTQ Propinsi Sumatera Barat	- Jumlah kafilah yang mengikuti TC MTQ Propinsi Sumbar - Jumlah kafilah yang mengikuti MTQ	102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ	2.044.320.000			102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ	2.503.613.200			102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ	2.900.000.000	102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ	7.447.933.200
	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang Panjang	Jumlah kegiatan MTQ Tingkat Kota Padang Panjang			2 Kec, 16 Kel	500.000.000			2 Kec, 16 Kel	600.000.000			2 Kec, 16 Kel	1.100.000.000
	Pembinaan Remaja Mesjid	Jumlah mesjid yang menyelenggarakan kegiatan Remaja Mesjid	34 Masjid	264.100.000	34 Masjid	290.000.000	34 Masjid	290.000.000	34 Masjid	290.000.000	34 Masjid	290.000.000	34 Masjid	1.424.100.000
	Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majelis Taklim Bulanan	Jumlah Mesjid yang menyelenggarakan kegiatan Remaja Mesjid	34 Kelompok	68.150.000	34 Kelompok	70.000.000	34 Kelompok	70.000.000	34 Kelompok	70.000.000	34 Kelompok	70.000.000	34 Kelompok	348.150.000

			Fasilitasi Kegiatan Islamic Center	Operasional Islamic Centre yang disiapkan		1 laporan	512.125.000	1 laporan	600.000.000	1 laporan	600.000.000	1 laporan	600.000.000	1 laporan	600.000.000	5 laporan	2.912.125.000
			Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran	Jumlah kampung Tahfiz Qur'an yang terbentuk		2 kampung Tahfiz	114.780.000	4 kampung Tahfiz	130.000.000	6 kampung Tahfiz	130.000.000	8 kampung Tahfiz	130.000.000	10 kampung Tahfiz	130.000.000	10 kampung Tahfiz	634.780.000
			Subuh Mubarakah	Jumlah Kegiatan Subuh Mubarakah Yang dilaksanakan		11 Kali	181.600.000	11 Kali	200.000.000	11 Kali	200.000.000	11 Kali	200.000.000	11 Kali	200.000.000	55 Kali	981.600.000
			Peringatan Hari Santri	Jumlah laporan Peringatan Hari Santri Nasional di Kota Padang Panjang		1 laporan	300.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	456.262.500	1 laporan	1.500.000.000	1 laporan	524.761.875	5 laporan	3.181.024.375
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah				Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		70,00		77,50		80,00		85,00		87,50		87,5	
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang		80		85		90		90		90		90	
	15		Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah	Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		90%	195.000.000	90%	300.000.000	90%	235.000.000	90%	190.000.000	90%	190.000.000	90%	1.110.000.000
			Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah monitoring Pengendalian Laju Inflasi daerah di Kota Padang Panjang		4 kali	50.000.000	4 kali	140.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	-	4 kali		20 kali	240.000.000
				Jumlah Survei standar biaya Hidup		0		1 kali		0		0		0		1 kali	
				Jumlah Survei Pemetaan Distribusi		0		0		1 kali		0		0		0	
			Koordinasi kebijakan urusan pertanian, industri rumah tangga, industri kecil Menengah	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Koordinasi urusan pertanian, industri rumah tangga, industri kecil Menengah		4 kali	25.000.000									4 kali, 1 laporan	25.000.000

		Koordinasi Kebijakan Umum Pangan, Pertanian dan UMKM	Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan umum Pangan, Pertanian dan UMKM	0	0	4 kali	30.000.000	4 kali	35.000.000	4 kali	40.000.000	4 kali	40.000.000	16 kali	145.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang	Jumlah KPRI yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya	26 KPRI	35.000.000	26 KPRI	40.000.000	26 KPRI	40.000.000	26 KPRI	40.000.000	26 KPRI	40.000.000	26 KPRI	195.000.000
		Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah	Jumlah monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah yang dilaksanakan	4 kali	50.000.000	4 kali	43.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	20 kali	243.000.000
		Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan	Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup	1kali	35.000.000									2 kali , 1 dokumen	35.000.000
		Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan dan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup	0	0	4 kali	47.000.000	4 kali	60.000.000	4 kali	60.000.000	4 kali	60.000.000	16 kali	227.000.000
	Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah		Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	70		75		75		80		85		85	
	16	Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	95%	453.430.000	95%	1.393.142.000	95%	1.402.988.300	95%	1.413.601.400	95%	1.426.266.610	95%	6.089.428.310
		Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan	12 Laporan	30.985.000									12 Laporan	30.985.000
		Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Rapat Simbangda yang dievaluasi	Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan dan Sosialisasi Aplikasi Simbangda yang dilaksanakan			12 laporan dan 80 orang	70.000.000	12 laporan dan 80 orang	70.000.000	12 laporan dan 80 orang	70.000.000	12 laporan dan 80 orang	70.000.000	12 laporan dan 80 orang	280.000.000
		Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE dan aplikasi pendukungnya)	110 orang	71.425.000	110 orang	80.000.000	110 orang	80.000.000	110 orang	80.000.000	110 orang	80.000.000	550 orang	391.425.000
		Operasional Maintenance LPSE	Jumlah Infrastruktur LPSE yang terpelihara	1 paket	78.000.000	1 paket	897.000.000	1 paket	897.000.000	1 paket	897.000.000	1 paket	897.000.000	5 paket	3.666.000.000

	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pokja ULP dan PPK		80 orang	28.860.000	80 orang	57.002.000	80 orang	61.052.300	80 orang	65.000.000	80 orang	70.000.000	400 orang	281.914.300
	Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan		80 orang	17.080.000		-		0		-		-	80 orang	17.080.000
	Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur	Jumlah peserta Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur		80 orang	23.480.000		-		0		-		-	80 orang	23.480.000
	Fasilitasi Kerjasama dengan LKPP	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan			33.600.000	2 orang	38.640.000	2 orang	44.436.000	2 orang	51.101.400	2 orang	58.766.610	8 orang	226.544.010
	Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa		80 org	170.000.000	80 org	170.000.000	80 org	170.000.000	80 org	170.000.000	80 org	170.000.000	400 orang	850.000.000
	Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001	Jumlah evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan				1 kali	80.500.000	1 kali	80.500.000	1 kali	80.500.000	1 kali	80.500.000	4 kali	322.000.000
	Jumlah				30.678.233.250		27.354.622.900		30.317.904.325		40.742.763.724		29.832.457.970		158.925.982.169

BAB VII
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 di gambarkan melalui Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-1923

INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL (TAHUN 2017)	Target Sasaran Kinerja Sasaran Pada tahun ke					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
Predikat sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	B	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)	100
Nilai Sakip	CC	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)	A (80,02)
Nilai LKPPD		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Persentase pemenuhan pelayanan Adminitrasi Perkantoran		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		84	85	85	86	87	87
Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah yang terlaksana			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jumlah OPD dengan nilai SAKIP sesuai dengan target Kota			13	13	18	18	24
Jumlah penataan Kelembagaan		1 kali	3 kali	1 kali	1 kali	1 kali	7 kali
Jumlah Dokumen Tatalaksana		2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	11 dokumen
Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan kepala daerah		0	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah media pubikasi dan share informasi berbagai kegiatan KDH dan pemerintah daerah		1 media					
Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan		2 kec	2 kec	2 kec	2 kec	2 kec	2 kec
Nilai LPPD		3.10	3.14	3.15	3.20	3.25	3.25
LKPJ		Diterima	Diterima	Diterima	Diterima	Diterima	Diterima
Jumlah OPD dengan nilai SAKIP >50		0	10	12	14	16	16
Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi							
Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat		78 (Baik)	79 Baik	80 (Baik)	81 (Baik)	82 (Baik)	82 (Baik)
Standar Pelayanan Minimal		84,67	86,33	87,83	89,67	92,50	92,50
Nilai rata rata kualitas pelayanan publik		3.25	3.30	3.35	3.40	3.45	3.45
Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid		38.82	56.58	74.34	90.79	100	100
Peringkat prestasi Kafilah MTQ Kota Padang Panjang di Tingkat Propinsi		Peringkat 9		Peringkat 8		Peringkat 7	Peringkat 7
Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat propinsi		1 sekolah	2 sekolah	3 sekolah	4 sekolah	5 sekolah	5 sekolah
Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		80	85	90	90	90	90
Persentase Implementasi kebijakan perekonomian		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan		70	75	75	80	85	85
Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk periode 5 (lima) tahun yang bersifat teknis strategis yang disusun berdasarkan kondisi eksisting, analisis lingkungan strategis serta mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan Kota Padang Panjang. Renstra ini disusun dengan harapan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis ini juga merupakan acuan bagi Sekretariat Daerah berikut dengan seluruh unsur staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Strategis secara proporsional dan profesional tentunya sangat membutuhkan komitmen dan dukungan bersama, baik dari unsur pimpinan beserta seluruh staf, ketersediaan SDM Aparatur, dana, sarana dan prasarana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, maupun dukungan dari seluruh Perangkat Daerah.

7.2. Pengendalian dan Evaluasi

Untuk melihat tingkat kemajuan atau capaian dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga efektifitas pelaksanaannya, diperlukan suatu sistem atau mekanisme pengendalian yang komprehensif dan evaluasi secara berkala. Pengendalian dan Evaluasi dimaksud dilaksanakan baik dalam periode tahunan maupun lima tahunan sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas.

Padang Panjang, 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si.

Pembina Utama Madya/NIP. 19750331 199501 1 001

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :